Department of Digital Business
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS
Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 28139- 28147
P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Miniatur Membangun Pluralisme Dunia: Studi Kasus Toleransi Beragama Masyarakat Kota Kediri

Dimas Atoul Ibad
Mahasiswa S2 Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
ibadimas2@gmail.com

Abstrak

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara paling majemuk di dunia dengan keragaman suku, bahasa, budaya, agama dan berbagai aliran kepercayaan. Bentuk kultural nusantara terdiri dari akumulasi lebih 1.300 etnis, 700-an bahasa daerah, enam agama resmi dan corak kepercayaan lokal yang tersebar merata di setiap daerahnya. Namun, di balik bingkai kebhinekaan tersebut, tersimpan kerentanan struktural berupa potensi gesekan sosial dan intoleransi yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kerukunan lintas iman di Indonesia melalui studi kasus pada masyarakat Kota Kediri, yang diposisikan sebagai cerminan global dalam merawat keberagaman dunia. Kota Kediri memiliki keunikan sosiologis sebagai salah satu daerah paling toleran di Indonesia, dimana penduduknya hidup berdampingan secara harmonis. Menggunakan metode kualitatif studi literatur, penelitian ini mengidentifikasi tiga pilar utama di balik keberhasilan Kota Kediri dalam mempertahankan kerukunan warganya. Pertama, adanya sinergi kelembagaan dan efektivitas organisasi lintas iman seperti FKUB dan PAUB-PK yang didukung oleh regulasi serta komitmen pemerintah daerah. Kedua, terciptanya harmonisasi kultural di tingkat akar rumput, seperti interaksi inklusif lintas budaya dan etnis yang terjalin erat di Kelurahan Pakelan. Ketiga, penerapan pendidikan multikultural yang inklusif di lembaga pendidikan formal, seperti kebijakan penyediaan literatur lintas agama secara terbuka di SMAN 8 Kota Kediri. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pluralisme aktif dan komunikasi multi pihak yang intensif mampu mentransformasikan keberagaman demografis menjadi kekuatan sosial yang kokoh dalam mempererat persaudaraan nasional.

Kata Kunci: *Pluralisme Dunia, Toleransi Beragama, Kota Kediri*

1. Latar Belakang

Berdasarkan data dari Harvard Institute for Economic Research, Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu negara paling majemuk di dunia(Wijanarka et al., n.d.). Mengacu pada data Kemendikbudristek, lanskap kultural nusantara ditopang oleh akumulasi lebih dari 1.300 etnis, 700-an bahasa daerah, enam agama resmi, dan corak kepercayaan lokal yang tersebar merata. Bentuk negara Indonesia yang memiliki banyak pulau seakan memberikan gambaran bahwa keseragaman antar daerah sangat sulit dilakukan bahkan mustahil terjadi. Keragaman masif ini dikondisikan oleh dua determinan utama: topografi kepulauan yang membatasi isolasi kultural serta watak komunal yang adaptif terhadap dinamika eksternal. Di balik bingkai kebhinekaan, pluralitas sosial Indonesia menyimpan kerentanan struktural berupa perpecahan horizontal berbasis SARA yang mengurangi semangat kebangsaan. Akibat dari dinamika seperti ini menciptakan kultur intoleransi yang sistemik. Menghadapi ancaman penurunan makna kemajemukan tersebut, penanaman toleransi berdiri sebagai solusi fundamental, bukan sekadar penyeimbang, melainkan antitesis otentik bagi intoleransi yang dimaknai secara negatif. Intoleransi menjadi resiko terbesar bagi negara Indonesia yang memiliki masyarakat multikultural dari setiap pulau-pulaunya. Tidak bisa dipungkiri dengan kondisi geografis Indonesia yang terpisah pulau-pulau kecil atau pun besar akan menciptakan keberagaman yang sangat besar bagi kebijakan lokal masing-masing daerah.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multikultural yang ditandai oleh keberagaman agama, etnis, budaya, dan tradisi. Keberagaman tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat, namun di sisi lain juga berpotensi memunculkan gesekan apabila tidak dikelola melalui nilai-nilai toleransi dan integrasi sosial(Issues, 2026). Toleransi dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai sikap menerima perbedaan, tetapi juga mencakup sikap saling menghormati, menghargai, dan hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman(Santika et al., 2026). Pembangunan toleransi beragama memerlukan tiga fondasi utama sebagai pijakan, yakni keterlibatan aktif dalam merawat keragaman agar bernilai konstruktif dan mendatangkan kebajikan bersama, keterbukaan mental untuk menghindari klaim kebenaran sepihak karena nilai substansial

seperti kasih sayang dan kejujuran turut diajarkan dalam agama lain, serta penerapan sikap saling menghormati secara nyata. Pemahaman terhadap ketiga prasyarat inilah yang kemudian menjadi kompas penentu dalam merumuskan nilai-nilai fundamental yang efektif untuk ditanamkan guna menciptakan harmoni antarumat beragama.

Keberagaman agama merupakan realitas global yang merefleksikan kekayaan budaya manusia melalui variasi keyakinan, praktik, dan ritual peribadatan di berbagai penjuru dunia. Fenomena kompleks ini tidak sekadar menunjukkan banyaknya agama yang dianut oleh individu maupun kelompok masyarakat, melainkan juga menjadi cerminan dari dinamika sosial dalam masyarakat dunia yang heterogeny. Di tengah tingginya heterogenitas keyakinan di Indonesia, konsep kemajemukan memiliki urgensi yang sangat mendasar. Landasan ideologi Pancasila, khususnya sila pertama, menegaskan bahwa legitimasi terhadap eksistensi multireligius merupakan pijakan utama bangsa. Kendati demikian, adanya pengakuan terhadap pluralitas keagamaan ini tidak menjadi garansi bahwa gesekan sosial akibat perbedaan iman akan hilang dengan sendirinya. Dalam konteks ini, pluralisme berperan penting dalam membangun toleransi, dialog, dan saling pengertian untuk menjaga keharmonisan masyarakat (Nendissa et al., 2025). Dalam tataran praktis, internalisasi nilai-nilai pluralisme ini perlu diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional untuk membentuk pola pikir generasi muda yang toleran. Dengan mengenalkan esensi perbedaan sejak dini, masyarakat tidak hanya sekadar 'merayakan' keberagaman, tetapi juga memiliki ketahanan sosial yang kuat terhadap provokasi atau isu-isu intoleransi yang berpotensi memecah belah bangsa.

Realitas sosial di Indonesia menuntut warganya untuk saling berdampingan di tengah heterogenitas suku, ras, tradisi, dan keyakinan. Secara legal formal, lanskap keagamaan di tanah air sendiri diwarnai oleh keberadaan enam pemeluk agama, meliputi Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Khonghucu. Dengan adanya keragaman ini bisa menjadi patokan dalam membangkitkan sikap toleransi kita terhadap sesama makhluk sosial (Asrhofiah, 2023). Sikap toleransi ini tidak sekadar diwujudkan dengan mengakui perbedaan, melainkan melalui tindakan nyata seperti saling menghormati hari besar keagamaan, bekerja sama dalam kegiatan sosial tanpa memandang latar belakang, serta menjaga hak beribadah sesama. Ketika batasan etnis dan keyakinan tidak lagi menjadi penghalang untuk bergotong royong, keberagaman ini bertransformasi dari sekadar realitas demografis menjadi kekuatan sosial yang memperkokoh persaudaraan nasional. Transformasi nilai ini secara otomatis akan membentuk jaring pengaman sosial yang kuat di dalam masyarakat, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu intoleransi atau polarisasi. Ketika rasa persaudaraan nasional telah mengakar melalui kolaborasi nyata sehari-hari, setiap potensi gesekan akibat perbedaan keyakinan dapat diredam secara damai melalui semangat kekeluargaan.

Meskipun dasar-dasar ideologis sudah ada, bentuk-bentuk intoleransi tetap sering terjadi berbagai daerah di Indonesia. Eskalasi konflik yang didasari oleh sentimen keagamaan, ujaran kebencian, serta diskriminasi terhadap kelompok minoritas menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya terinternalisasi secara baik(Santika et al., 2026). Kerentanan sosial tersebut berakar dari lemahnya internalisasi nilai Pancasila, pembentukan karakter pendidikan yang kurang efektif, serta paparan disrupsi informasi digital yang kontradiktif dengan jati diri bangsa. Temuan (Susiati et al., 2022) menguatkan bahwa gesekan komunal pada masyarakat multikultural dipicu oleh defisit toleransi serta terbatasnya ruang perjumpaan lintas iman. Konsekuensinya, perumusan strategi internalisasi Pancasila yang komprehensif dan adaptif terhadap dinamika kontemporer menjadi kebutuhan mendesak. Melalui jalur formal, institusi pendidikan memegang kendali strategis dalam menerjemahkan nilai Pancasila lewat sinergi mata pelajaran PPKn, program ko/ekstrakurikuler, dan ekosistem kultur sekolah yang inklusif. Pengarusutamaan pendidikan kebangsaan secara konsisten terbukti efektif menanamkan mentalitas penghormatan atas keragaman sebagai jangkar sosial.

Komitmen Indonesia sebagai entitas non teokrasi diwujudkan melalui pemberian ruang kebebasan beragama yang utuh, di mana hak kepemilikan keyakinan spiritual dilekatkan sepenuhnya kepada seluruh masyarakat tanpa intervensi. Untuk mendorong pola pikir masyarakat yang inklusif dan toleran terhadap perbedaan agama maupun ras, pemerintah menempuh langkah strategis berupa rencana pembentukan lembaga khusus penanganan konflik lintas iman. Upaya mengawal harmoni di tengah masyarakat dapat berjalan secara lebih masif jika ditransformasikan melalui seluruh saluran instruksional, mulai dari jalur pendidikan resmi, kegiatan nonformal, hingga interaksi informal keluarga. Pembentukan karakter inklusif sejak dini merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya kondusivitas negara, yang sekaligus berperan sebagai motor penggerak solidaritas sosial dalam membingkai keberagaman Indonesia. Kerja sama yang rukun dapat terjadi karena pemeluk agama saling membutuhkan, saling menghargai perbedaan antara satu dengan yang lain, saling tolong menolong, dan dapat menyatukan pendapat satu dengan yang lain atau dapat disebut memiliki sifat toleransi (Sensiana & Mukti, 2025).

DOI: https://doi.org/ 10.31004/riggs.v5i2.10801
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Esensi dari pendekatan ini adalah proses saling mengenal dan saling memahami eksistensi dan hak masing-masing penganut agama (Fauziah, 2025).

Kebebasan spiritual dan keamanan dalam beribadah bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan hak yang dilindungi oleh UUD 1945 melalui Pasal 28E dan Pasal 29. Dua pasal krusial ini menegaskan bahwa pemilihan keyakinan adalah hak prerogatif setiap individu. Pasal 28E ayat (2) menjamin kebebasan atas pilihan iman yang dianut, yang kemudian dipertegas oleh Pasal 29 ayat (1) dan (2) mengenai komitmen negara dalam memfasilitasi perlindungan bagi warga negara saat menjalankan ritual keagamaan mereka. Perbedaan kebudayaan antar daerah sangat mendukung keistimewaan setiap pulau di Indonesia (Nanda et al., n.d.). Penghargaan atas perbedaan iman dan pembentukan interaksi yang harmonis merupakan esensi sejati dari pluralisme keagamaan. Hal ini menegaskan bahwa keberagaman tidak cukup dihadapi dengan sikap pembiaran yang pasif, melainkan harus direspons melalui upaya kolektif dalam membangun ikatan sosial yang saling menghormati. Gagasan ini menekankan adanya nilai-nilai universal yang dapat menjadi dasar untuk hidup berdampingan secara damai meskipun terdapat perbedaan pandangan teologis (Nendissa et al., 2025).

Doktrin "Tri Kerukunan Umat Beragama" diaktualisasikan oleh Pemerintah Indonesia sebagai instrumen strategis dalam mengawal kondusivitas negara, dimana kebijakannya berfokus pada tiga pilar utama: keselarasan di dalam internal pemeluk agama, keharmonisan antar kelompok iman yang berbeda, serta sinergisitas yang solid antara seluruh pemeluk agama dengan jajaran birokrasi pemerintahan. FKUB Kota Kediri, yang dibentuk pada tahun 2000, menjadi salah satu bukti nyata bagaimana manajemen toleransi dijalankan di tingkat lokal. Lembaga ini merupakan bagian dari jaringan FKUB yang diinisiasi pemerintah sejak era reformasi untuk meredam isu SARA dan potensi pecahnya keutuhan bangsa. Melalui wadah strategis ini, kemerdekaan individu dalam memeluk agama tetap dijamin penuh, dengan prioritas utama menjaga kohesi dan harmoni sosial di masyarakat. Lembaga tersebut bertindak sebagai ruang inklusif yang merefleksikan keberadaan enam agama konstitusional: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Selain itu, di Kota Kediri juga terdapat PAUB-PK (Paguyuban Antar Ummat Beragama dan Penghayat Kepercayaan) yang berdiri tahun 1998 berdasarkan inisiatif dari tokoh tokoh agama setempat (Munif et al., 2024). Sebagai acuan nasional dalam membangun ekosistem masyarakat yang inklusif dan damai, Kota Kediri menawarkan contoh konkret pengelolaan keberagaman. Posisi strategis ini didukung oleh temuan Setara Institut periode 2020–2021 yang menempatkan kota ini di peringkat 10 besar kota paling toleran di Indonesia—satu-satunya di Jawa Timur—melalui raihan skor 5,733 dari skala 1–7. Angka tersebut dipertegas kembali oleh perolehan Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Kediri yang menembus kategori tinggi di angka 3,97 dari nilai maksimal 5. Kota Kediri adalah satu-satu kota yang penduduknya menganut enam agama dan kepercayaan, yakni Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Budha dan Kong hu chu serta satu lagi Penghayat Kepercayaan artinya jika kita ingin mengetahui miniature keberagamaan di Indonesia, maka tidak berlebihan untuk mengatakan “lihatlah Kota Kediri” (Ilmi & Aditya, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis pengalaman toleransi beragama di Indonesia sebagai miniatur membangun pluralisme dunia dengan studi kasus di masyarakat Kota Kediri. Penelitian ini tidak hanya mengkaji keberagaman dan pluralisme secara teoritis, tetapi juga mengkaji keterkaitan pluralisme dengan pengalaman toleransi beragama yang terjadi di Kota Kediri. Melalui temuan-temuan tersebut, studi ini diproyeksikan mampu menyumbang kontribusi teoretis yang segar bagi diskursus akademik, khususnya dalam memperkaya literatur mengenai dinamika kerukunan umat beragama pada lingkup lokal.

2. Metode Penelitian

Melalui desain studi kasus berbasis kualitatif dan kajian pustaka, penelitian ini berusaha mengurai secara holistik kompleksitas interaksi toleransi dalam realitas sosial-budaya. Langkah ini diambil untuk membangun landasan teoretis yang kuat dalam menginterpretasikan toleransi keagamaan dari perspektif rekonstruksi pluralisme global. Untuk membedah temuan tersebut, instrumen analisis tematik digunakan sebagai pisau analisis guna mengidentifikasi bagaimana pola penanaman nilai bekerja, apa saja faktor stimulasinya, serta kendala apa yang membatasi proses tersebut. Hasil akhir dari metode ini diharapkan dapat merumuskan rekomendasi aplikatif bagi pendidikan multikultural di lingkungan masyarakat yang multireligius.

Kredibilitas riset ini disokong oleh dua kategori rujukan, yaitu data primer dan sekunder. Nash suci Al-Qur'an serta sunah nabi (hadis) ditempatkan sebagai pilar data utama, sementara publikasi jurnal akademis beserta dokumen laporan riset terdahulu yang sejalan difungsikan sebagai data pendukung.

DOI: https://doi.org/ 10.31004/riggs.v5i2.10801
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Konsep Toleransi Beragama dan Pluralisme

Toleransi diartikan sebagai sikap terbuka dalam menghargai perbedaan pendapat, latar belakang kebudayaan, serta variasi agama dan keyakinan. Penanaman konsep toleransi ini sangat krusial jika diintegrasikan sejak usia dini, mengingat fase tersebut merupakan masa keemasan (*golden age*) bagi pembentukan karakter dan kepribadian anak. Melalui implementasi pendidikan toleransi yang tepat sejak dini, anak akan internalisasi nilai-nilai karakter luhur secara lebih optimal. Keberagaman di dalam masyarakat menuntut hadirnya dua bentuk toleransi utama, yaitu toleransi bidang agama dan sosial. Jika toleransi beragama berbicara tentang aspek akidah dan kelapangan dada untuk membiarkan kelompok lain beribadah sesuai imannya, maka toleransi sosial menjadi instrumen penting dalam mengatur hubungan antarmasyarakat agar tetap harmonis terlepas dari perbedaan suku, budaya, maupun pelapisan sosial yang ada karena adanya perbedaan pemeluk agama, keyakinan, kepercayaan yang harus menegakkan keadilan, kedamaian, dan melakukan tugas yang diberikan dengan ketentuan batasan batasan tertentu (Sensiana & Mukti, 2025).

Harmoni dalam kehidupan bermasyarakat sering kali bersumber dari watak alamiah individu yang kemudian mengkristal menjadi kebiasaan saling menghormati. Secara sosiologis, kondisi ini disebut sebagai akomodasi sosial (formal maupun informal) yang tumbuh secara organik dalam interaksi keseharian. Landasan konseptual ini sejalan dengan akar kebahasaannya, di mana istilah toleransi diambil dari kata Latin *"tolerare"* yang berarti kerelaan hati untuk membiarkan adanya perbedaan sikap, tindakan, dan pandangan tanpa upaya menjatuhkannya. Maka menjadi benar jika ada yang mengatakan bahwa toleransi adalah tulang punggung kerukunan, mungkin itulah kata-kata yang tepat untuk menggambarkan toleransi (Ilmi & Aditya, 2024). Toleransi merupakan elemen esensial yang melekat erat pada konsep moderasi beragama. Dalam hubungan kausalitaseduanya, moderasi beragama diposisikan sebagai sebuah proses atau ikhtiar yang dijalankan, sedangkan toleransi merupakan output nyata atau buah dari keberhasilan implementasi moderasi tersebut. Oleh karena itu, setelah Presiden Joko Widodo mengeuarkan Perpres No 58 Tahun 2023 mengenai Penguatan Moderasi Beragama pada tanggal 25 September 2023 (Mahmudah & Aminah, 2024).

Kerukunan lintas keyakinan mengindikasikan adanya kesediaan individu untuk menghargai serta memberikan ruang bagi pemeluk agama lain dalam menjalankan ritual peribadatan sesuai dengan ketentuan teologis masing-masing, tanpa mengganggu atau terkesan memaksa (Ilmiah et al., 2025). Dari aspek teknis, implementasi toleransi antarumat beragama dalam kehidupan bermasyarakat erat kaitannya dengan jaminan kebebasan serta kemerdekaan individu untuk mengartikulasikan dan mengekspresikan ajaran iman mereka. Tindakan toleransi ini merefleksikan adanya legitimasi bersama terhadap kebebasan berkeyakinan, yang menempatkan hak beribadah setiap pemeluk agama pada kedudukan yang setara dan mandiri dalam ruang publik. Dalam praktiknya, jaminan kebebasan ini terwujud ketika ruang publik—baik di tingkat kelurahan maupun institusi pendidikan—menyediakan ruang yang setara bagi seluruh golongan untuk merayakan identitas spiritual mereka. Pengakuan kultural yang setara inilah yang kemudian memperkuat fondasi integrasi sosial masyarakat. Namun, kemerdekaan berekspresi ini juga harus dibarengi dengan kesadaran untuk tidak mencederai ruang publik atau mengganggu hak beragama kelompok lain. Sikap saling membatasi diri demi kenyamanan bersama inilah yang menjadi esensi utama dari kehidupan bernegara yang dewasa dan beradab.

Proses penanaman prinsip-prinsip toleransi dapat diakomodasi secara aplikatif lewat pendekatan pendidikan karakter, khususnya bila dibedah menggunakan pisau analisis Thomas Lickona. Teori ini memetakan bahwa integritas kepribadian seseorang ditopang oleh jalinan tiga elemen esensial, yakni penalaran moral (*moral knowing*), kepekaan nurani (*moral feeling*), serta perwujudan perilaku moral (*moral action*). Manifestasi pilar tersebut dalam ranah toleransi tecermin dari kemampuan kognitif seseorang untuk memahami serta menghormati perbedaan opini, budaya, dan iman. Sementara itu, dimensi perasaan moral diwujudkan melalui pengembangan rasa empati dan kepedulian emosional, yang berfungsi mengikis prasangka sosial dalam memandang keberagaman. Kolaborasi inklusif dan rasa saling menghargai merupakan bentuk nyata dari manifestasi toleransi yang digerakkan oleh kesadaran moral individu. Aspek moral ini menekankan bahwa toleransi tidak boleh berhenti sebagai wacana, melainkan harus ditunjukkan melalui tindakan riil di tengah masyarakat dan menyelesaikan konflik secara konstruktif (Aisah et al., 2026).

Dari perspektif teologis, pluralisme menuntut setiap pemeluk agama untuk memperluas cakrawala berpikir dalam menyikapi eksistensi keyakinan lain tanpa harus mengorbankan identitas akidah atau jati diri keagamaan masing-masing. Sebagai contoh, dalam tradisi Kristen, pluralisme dapat dioptimalkan sebagai instrumen untuk menghayati manifestasi kasih Tuhan di tengah realitas kemajemukan. Sudut pandang teologis yang inklusif ini sangat krusial

DOI: https://doi.org/ 10.31004/riggs.v5i2.10801
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

dalam mengidentifikasi titik temu guna mengonstruksi kehidupan komunal yang harmonis. Seiring dengan arus globalisasi yang mempererat interaksi lintas iman—baik yang dipicu oleh kecanggihan teknologi, pola migrasi, maupun dinamika global lainnya—urgensi pluralisme agama menjadi kian relevan. Mobilitas interaksi yang intensif ini membuka peluang besar bagi kerja sama yang produktif, sekaligus menyimpan potensi benturan sosial jika tidak dimanajemeni secara bijaksana. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang pluralisme agama-agama diperlukan untuk menciptakan hubungan yang konstruktif dan damai (Nendissa et al., 2025).

Pluralisme dalam kehidupan beragama di Indonesia bertumpu pada prinsip saling menghormati dan mengakui hak setiap individu untuk menjalankan keyakinannya(Info, 2024). Corak pemahaman publik mengenai pluralisme membentang secara kontradiktif, dipetakan oleh variabel pendidikan, budaya, dan literasi digital. Sebagian masyarakat menilainya secara konstruktif sebagai wahana koeksistensi damai tanpa mereduksi identitas dogmatis. Sebaliknya, resistensi muncul dari kutub eksklusif yang memandangnya sebagai ancaman teologis akibat minimnya edukasi, adiksi narasi digital intoleran, dan politisasi identitas komunal. Mengatasi deviasi tersebut menuntut intervensi sistemik inklusivitas kurikulum di jalur akademik serta kepeloporan negara dan pemuka agama dalam membudidayakan toleransi sebagai etos perdamaian nasional. Manifestasi pluralisme religius di Indonesia paling otentik berada dalam kehidupan sosiokultural harian. Bermacam-macam perjumpaan lintas iman mulai dari tradisi gotong royong, partisipasi dalam perayaan hari besar komunal, hingga kolaborasi program kemanusiaan menjadi indikator empiris bahwa koeksistensi tidak lagi sebatas bentuk normatif, melainkan hidup sebagai praktik kebudayaan yang mengakar.

Secara etimologis, istilah pluralisme agama terbentuk dari dua kata, yaitu "pluralisme" dan "agama". Dalam terminologi bahasa Arab, konsep ini dikenal dengan istilah *al-ta'addudiyah al-diniyyah*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut sebagai *religious pluralism*. Dalam KBBI, pluralisme didefinisikan sebagai keadaan yang bersifat jamak atau lebih dari satu. Sementara itu, kamus bahasa Inggris membagi pengertian pluralisme ke dalam dua dimensi utama, yaitu aspek sosio politis dan filosofis. Dari sudut pandang filosofis, pluralisme merupakan sistem pemikiran yang mengabsahkan adanya landasan berpikir yang majemuk. Adapun dalam ranah sosio-politis, konsep ini merujuk pada suatu sistem yang hidup bersama di tengah keberagaman kelompok, dengan tetap menghormati karakteristik unik yang melekat pada setiap kelompok tersebut. Sehingga jika disimpulkan pengertian Pluralisme agama adalah sebuah kondisi kehidupan bersama antar agma yang berbeda-beda dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan karakteristiknya masing-masing (Safira et al., n.d.). Pluralisme menurut Gus Dur merupakan sebuah *sunnatullah*. Hal ini bukan sekedar pandangan terhadap keragaman, namun harus sejalan dengan keterlibatan aktif. Sehingga menciptakan harmonisasi masyarakat Indonesia yang majemuk. Menurut Hasyim Muzadi pluralisme merupakan cara untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama. Sikap toleransi tidak hanya menerima perbedaan, melainkan ikut aktif dalam menciptakan ruang untuk diskusi, kerja sama, dan kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman agama, suku, dan budaya(Sabrina, 2024).

Pluralisme berasal dari kata plural yang berarti jamak atau lebih dari satu. Pluralis yaitu bersifat jamak (banyak). Pluralisme adalah hal yang mengatakan jamak atau tidak satu; kebudayaan: berbagai kebudayaan yang berbeda-beda di suatu masyarakat(Mawardi, 2025). Secara teologis, pluralisme merujuk pada penolakan reduksi prinsip tunggal demi merangkul keragaman lintas kultural, politik, dan religius. Pembagian kata "agama" melahirkan taksonomi khusus yang melampaui definisi leksikal biasa meski beririsan dengan toleransi dan respek, paham ini menyetarakan posisi esensial antar agama. Di kalangan intelektual Muslim Indonesia, dimensi ini bercabang: secara sosiologis dia diterima objektif sebagai fakta kemajemukan komunal, namun terbatas pada pengakuan eksistensial tanpa melebur legitimasi etis atau teologis keyakinan lain. Pluralitas religius di Indonesia yang tercermin melalui pengakuan resmi terhadap Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Jadi tidak hanya data demografis, melainkan medan aktualisasi etika sosial. Kesadaran atas kemajemukan ini diarahkan untuk menumbuhkan respek timbal balik, mengoperasionalkan prinsip *hablum minannas* lintas iman demi stabilitas sosial, serta menggalang solidaritas kolektif dalam menyelesaikan permasalahan bersama di tengah masyarakat.

Pluralisme dalam islam merupakan suatu paham yang mengakui dan menghargai adanya keragaman dalam kehidupan manusia, baik dalam aspek agama, budaya, etnis, maupun sosial (Muthoharoh et al., 2026). Pengelolaan yang bijak ini tidak hanya diwujudkan dalam bentuk wacana normatif, melainkan harus diturunkan ke dalam kebijakan publik yang adil serta penciptaan ruang dialog yang setara bagi kelompok minoritas. Ketika inklusivitas sosial ini berjalan, agama akan berfungsi efektif sebagai perekat sosial dan bukan sebagai pemantik konflik horizontal. Dalam sudut pandang teologi Islam, kemajemukan ini dipandang sebagai sebuah sunatullah atau garis realitas sosial yang tak terbantahkan, sehingga menuntut tata kelola yang bijak dan inklusif demi kemaslahatan bersama. Konsep ini selaras dengan prinsip Al-Qur'an bahwa heterogenitas kultural dan etnis manusia dimaksudkan untuk menciptakan harmoni komunikasi (*ta'aruf*), bukan perpecahan. Dampaknya, teologi

DOI: https://doi.org/ 10.31004/riggs.v5i2.10801
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

kemajemukan ini harus berubah menjadi etika publik yang menjamin rasa aman kultural dan eksistensial bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Dinamika kehidupan modern kerap mempertemukan masyarakat dengan polarisasi keyakinan dan prinsip hidup, yang berpotensi memicu gesekan serta ketegangan antar-komunitas. Di sisi lain, arus globalisasi kian mengakselerasi mobilitas interaksi lintas budaya dan agama. Realitas ini menjadikan pemahaman yang komprehensif mengenai nilai-nilai pluralisme dan toleransi sebagai urgensi yang sangat krusial untuk dirawat demi menjaga stabilitas sosial. Urgensi pemahaman pluralisme dan toleransi semakin terlihat dalam konteks globalisasi, di mana interaksi antarbudaya dan antaragama semakin meluas (Kastasari, n.d.). Potret riil dari kebinekaan di Indonesia dapat dilihat dari lanskap keagamaan serta keragaman sistem teologis yang tumbuh subur di dalam masyarakat. Negara ini tidak hanya melegitimasi keberadaan enam entitas agama utama (Khonghucu, Buddha, Hindu, Katolik, Kristen, dan Islam), tetapi juga menaungi eksistensi puluhan spiritualitas adat maupun penghayat kepercayaan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Beberapa di antaranya meliputi Sapta Darma di Jawa Timur, Sunda Wiwitan di Jawa Barat, Jawa Kawitan di Jawa Tengah, Parmalim di Sumatra Utara, Kaharingan di Kalimantan, Tolotang di Sulawesi Selatan, Marapu di Sumba, hingga Naurus di Pulau Seram, Maluku, Tonaas Walian di Sulawesi Utara dan Boti di Nusa Tenggara, dan sebagainya (Muna et al., 2024).

3.2. Fenomena Toleransi Beragama Masyarakat di Kota Kediri

Gambaran nyata mengenai keragaman iman dapat dengan mudah dijumpai di berbagai kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Fakta ini menegaskan bahwa provinsi tersebut memiliki potret sosiologis yang sangat kaya dalam hal implementasi pluralisme beragama dan juga kepercayaan lokal yang cukup kentara salah satunya adalah Kota Kediri (Muna et al., 2024). Fenomena ini tecermin secara nyata di Kelurahan Pakelan, Kota Kediri. Wilayah ini memiliki karakteristik sosiologis yang unik karena posisinya sebagai kawasan pecinan kuno yang kini resmi berstatus sebagai kampung cagar budaya (*heritage*). Eksistensi beragam kelompok etnis yang telah bermukim dan berinteraksi secara damai selama puluhan tahun di sana berhasil membentuk sebuah ekosistem sosial yang kaya sekaligus kompleks. Meskipun secara historis wilayah ini relatif stabil, dinamika sosial modern menuntut adanya upaya preventif yang sistematis untuk menjaga keharmonisan (Khafid & Faishol, 2026). Berdasarkan aspek demo-religius, komposisi masyarakat Kelurahan Pakelan didominasi oleh umat Nasrani (baik Katolik maupun Protestan) dengan persentase mencapai 85%, sementara 15% sisanya merupakan pemeluk agama Islam, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, serta mencakup setidaknya 70 warga penganut aliran kepercayaan (Radarkediri.jawapos.com, 2022). Adapun jika ditinjau dari latar belakang etnisitas, mayoritas penduduk kawasan ini adalah warga keturunan Tionghoa dengan porsi 65%, sedangkan bagian selebihnya merupakan masyarakat beretnis Jawa. Tak jarang, warga keturunan Tionghoa menikah dengan etnis Jawa (Ilmi & Aditya, 2024).

Realitas kemajemukan di Kelurahan Pakelan mengindikasikan perlunya ruang perjumpaan yang lebih substantif guna memperkukuh kohesi sosial. Oleh karena itu, aktivitas pengabdian masyarakat ini diarahkan untuk menjembatani dialog awal antara komunitas seni Barongsai dan Jaranan, yang diposisikan sebagai representasi dari dua pilar kebudayaan dominan di kawasan tersebut. Melalui pendekatan observasi lapangan serta wawancara semi-terstruktur, tim pengabdi berkomitmen memetakan serta mengontekstualisasikan nilai-nilai filosofis yang melandasi kedua kesenian tradisional tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan titik temu kultural yang dapat menjadi landasan bagi penguatan toleransi, sekaligus mereduksi dinding pembatas psikologis yang muncul akibat kurangnya ruang interaksi formal selama ini (Khafid & Faishol, 2026). Memasuki era Reformasi, Kota Kediri merekonstruksi tatanan baru yang lebih inklusif dalam lanskap interaksi lintas agama dan lintas budaya. Keterbukaan sosial memungkinkan munculnya dialog dan kerja sama antara komunitas Islam, Tionghoa, dan berbagai lembaga keagamaan lain (Al, 2025).

Selain di Kelurahan Pakelan, potret toleransi beragama di Kota Kediri juga terekam di SMAN 8 Kota Kediri. Lembaga pendidikan yang berdiri dalam lahan eks-Sekolah Guru Olahraga (SGO) sejak disahkan pada tahun 1991 ini memiliki karakteristik civitas akademika yang sangat majemuk. Secara sosioreligius, meskipun mayoritas siswa memeluk agama Islam, sekolah ini juga menampung kuantitas pelajar yang signifikan dari pemeluk Kristen, di samping eksistensi penganut Katolik dan Hindu. Sebagai instrumen preventif terhadap potensi konflik horizontal, nilai-nilai toleransi diinternalisasikan secara aktif dalam interaksi harian siswa, baik di dalam ruang kelas maupun dalam dinamika berorganisasi. Menariknya, para siswa dari kelompok minoritas tidak menunjukkan kecenderungan eksklusivisme atau pengelompokan berbasis iman. Sebaliknya, proses pembauran berjalan secara organik tanpa adanya tindakan diskriminatif dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Peran guru sangat penting dalam pemebntukan metode pembelajaran, proses pembelajaran, media pembelajaran, dan sikap

DOI: https://doi.org/ 10.31004/riggs.v5i2.10801
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

siswa dalam persaudaraan, serta sikap siswa dalam hal kepedulian, juga dalam sikap saling bekerja sama (Asrhofiah, 2023).

Interaksi antara siswa Muslim dan non Muslim di lingkungan sekolah didorong oleh berbagai faktor stimulan, salah satunya melalui penyediaan fasilitas penunjang akademik yang netral. Hal ini tecermin dari tata kelola perpustakaan sekolah yang tidak hanya menyediakan literatur islami, melainkan juga mengoleksi berbagai buku kerohanian serta Alkitab (Injil). Ketersediaan ragam literatur keagamaan yang terbuka bagi seluruh siswa ini menjadi sarana strategis untuk memfasilitasi keterbukaan wawasan sosioreligius dan literasi lintas iman di lingkungan sekolah. Kebijakan penyediaan literatur yang variatif ini membuktikan bahwa sekolah tidak sekadar mengajarkan teori toleransi di dalam kelas, melainkan menghadirkannya secara nyata dalam ekosistem belajar harian siswa. Melalui pemanfaatan fasilitas bersama seperti ini, harmonisasi antar pelajar mayoritas dan minoritas dapat terus dirawat secara berkelanjutan. Selain itu, fasilitas yang dapat digunakan bersama oleh siswa antar agama dapat menumbuhkan diskusi akademik yang tidak hanya bertujuan membangun sikap saling menghargai, tetapi saling mendukung peningkatan prestasi ketika di kelas.

3.3. Analisis Terhadap Keberlangsungan Toleransi Beragama

Di tengah realitas masyarakat yang majemuk, penanaman sikap saling menghormati menjadi pilar utama demi mewujudkan kedamaian dan kerukunan sosial. Dalam konteks ini, pemerintah memegang legitimasi penting selaku regulator yang memanajemeni harmonisasi kehidupan antarumat beragama. Langkah tersebut didukung oleh para tokoh agama yang berfungsi sebagai artikulator ajaran kebaikan sekaligus mitra strategis dalam menyelaraskan misi keagamaan dengan pembangunan nasional. Pada akhirnya, perwujudan persatuan nasional merupakan kondisi ideal sekaligus metodologi paling efektif untuk mengakselerasi pencapaian tujuan bersama. Untuk tetap menjaga hal tersebut dibutuhkan kesadaran individu akan pentingnya sikap toleransi antar umat beragama agar tetap terjalin hal baik di lingkungan masyarakat (Nanda et al., n.d.). Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, termasuk fasilitasi perwujudan kerukunan antarumat beragama di tingkat kabupaten/kota, merupakan bagian dari tugas dan kewajiban konstitusional kepala daerah. Regulasi tersebut secara yuridis diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menag dan Mendagri No 9 Tahun 2006 dan No 8 Tahun 2006 (yang sering dikenal sebagai PBM tentang Rumah Ibadah dan FKUB). Di dalamnya diatur tentang tanggungjawab dan mekanisme koordinasi untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban Masyarakat terkait kehidupan keagamaan, termasuk tentang pendirian rumah ibadah (Ishaq et al., 2025). Harmonisasi yang tumbuh dari kesadaran akar rumput ini tentu memerlukan instrumen pengendalian agar tidak sekadar menjadi wacana etis, melainkan terlembagakan secara terukur.

Eksistensi organisasi lintas iman telah melembaga secara kokoh di Kota Kediri melalui kehadiran beberapa wadah strategis, seperti Paguyuban Antar Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan, PaLM (Grup Pendampingan Hukum Perempuan dan Anak Lintas Madzab/Agama), serta Forum Pemuda Paguyuban Antar Umat Beragama. Berbagai organisasi dan paguyuban inklusif tersebut menempati posisi sentral serta instrumental dalam mengakselerasi dan merawat harmoni sosial antarumat beragama di daerah setempat. Adanya organisasi ini mempermudah koordinasi antar umat beragama (Ishaq et al., 2023). Kehadiran institusi lintas iman tersebut menjadi katalisator bagi terjaganya kontinuitas toleransi beragama di Kota Kediri secara optimal. Dampak positifnya tecermin dari kelancaran berbagai agenda kolaborasi antarumat beragama, seperti yang diimplementasikan di Kelurahan Pakelan maupun wilayah lain dengan tingkat dinamika keagamaan yang tinggi. Dalam ekosistem yang plural, intensitas komunikasi multipihak menjadi prasyarat mutlak untuk membangun sikap saling mendukung terhadap aktivitas keagamaan masing-masing. Sebagai salah satu episentrum kemajemukan di Jawa Timur, Kota Kediri secara strategis memosisikan diri sebagai daerah pelopor (*pioneer*) dalam merawat keberagaman.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa pluralisme agama bukanlah sekadar pengakuan pasif atas realitas perbedaan teologis, melainkan sebuah tindakan aktif dan arif untuk hidup bersebelahan dengan damai dalam bingkai koeksistensi sosial. Pada perspektif Islam, heterogenitas tersebut dipandang sebagai sunatullah yang tak terbantahkan, sehingga menuntut adanya tata kelola yang inklusif demi mewujudkan kemaslahatan bersama. Kota Kediri berhasil membuktikan perannya sebagai miniatur sekaligus pelopor (*role model*) pengelolaan pluralisme yang sukses di tingkat nasional. Keberhasilan Kota Kediri dalam merawat kerukunan ditopang oleh tiga pilar utama yang saling berkaitan. Peraturan Bersama Menteri No 9 dan 8 Tahun 2006 sebagai acuan hukum utama dalam melahirkan sinergisitas antarinstansi. Langkah ini diaktualisasikan secara nyata melalui keberpihakan

DOI: https://doi.org/ 10.31004/riggs.v5i2.10801
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

serta komitmen penuh dari pimpinan pemerintah daerah, serta efektivitas institusi lintas iman seperti FKUB, PAUB-PK, PaLM, dan Forum Pemuda Paguyuban Antar Umat Beragama dalam merawat jembatan dialog. Kedua, terciptanya harmonisasi kultural di akar rumput, seperti yang tecermin pada masyarakat Kelurahan Pakelan yang mampu menjaga kohesi sosial dan integrasi lintas budaya antara komunitas seni Barongsai dan Jaranan di tengah dominasi warga keturunan Tionghoa dan umat Nasrani. Ketiga, penerapan pendidikan multikultural yang inklusif di SMAN 8 Kota Kediri, di mana nilai toleransi diinternalisasikan secara nyata melalui kebijakan perpustakaan yang netral dan penyediaan literatur lintas agama secara terbuka untuk mencegah diskriminasi. Pada lanskap yang lebih luas, keberhasilan Kota Kediri dalam menempati jajaran wilayah dengan indeks toleransi tertinggi di tanah air menjadi sebuah pencapaian yang komprehensif dan membuktikan bahwa ketika komunikasi multipihak berjalan intensif, keberagaman demografis bertransformasi menjadi kekuatan sosial yang memperkokoh persaudaraan nasional.

Referensi

1. Aisah, D., Arifin, Z., & Imron, A. (2026). *Nilai-Nilai Toleransi Dalam Pendidikan di Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah Putri Lirboyo Kediri*. *05*(01), 49–58.
2. Al, V. (2025). *Relasi Masyarakat Islam dan Etnis Tionghoa di Kediri dalam Perspektif Historis*. *2*(November).
3. Asrhofiah, P. N. (2023). *Pola Interaksi Siswa-Siswi Kristen dan Muslim dalam Membangun Toleransi Beragama*. *1*(1), 25–36.
4. Fauziah, E. (2025). *Revitalisasi Epistemologi Ilmu Kalam sebagai Landasan Membangun Kerukunan Intern Umat Islam Melalui Pendekatan Teofilosofis*. *4*(1), 33–42. https://doi.org/10.5281/zenodo.15699948
5. Ilmi, P. W., & Aditya, A. (2024). *Kampung Pakelan : Khazanah Toleransi Antarumat Beragama dan Kepercayaan di Kota Kediri*. *15*(1), 47–69.
6. Ilmiah, J., Pendidikan, P., & Access, O. (2025). *3 1*,*2*,*3*. *3*(2), 12–21.
7. Info, A. (2024). *Implementasi Prinsip Pluralisme dalam Kehidupan Beragama di Indonesia*. *1*(1), 8–13.
8. Ishaq, R., Alamin, T., Munif, A., Huda, M. S., & Winarto, A. E. (2023). *Kerukunan Umat Beragama di Kota Kediri Tahun 2022*. *21*(01), 75–94.
9. Ishaq, R., Mujib, A., Munif, A., Alamin, T., & Winarto, A. E. (2025). *Realita : Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam Kerukunan dan Komunikasi Umat Beragama Masyarakat Kota Kediri Propinsi Jawa Timur Tahun 2024*. *23*(2), 422–437.
10. Issues, C. (2026). *Kemajemukan dan Toleransi Beragama Masyarakat Tuban : Analisis Struktural Fungsional Talcott Parsons*. *6*(1), 83–91.
11. Kastasari, F. (n.d.). *Peran Pendidikan Agama Islam dalam Memahami Pluralisme dan Toleransi di Dunia Kontemporer*.
12. Khafid, M. A., & Faishol, F. (2026). *Implementasi Nilai Toleransi dalam Keberagaman Budaya Masyarakat Kelurahan Pakelan , Kota Kediri*. 1–8.
13. Mahmudah, S., & Aminah, S. (2024). *Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Mencegah Sikap Intoleran dan Paham Radikalisme Agama di Kota Kediri Tahun 2023*. *7*(April), 4276–4284.
14. Mawardi, K. (2025). *Al-Wasathiyah : Journal of Islamic Studies Al-Wasathiyah : Journal of Islamic Studies*. *3*(2), 123–129. https://doi.org/10.56672/alwasathiyah.v3i2.110
15. Muna, N., Rizki, F., & Huda, M. T. (2024). *Potret Pluralisme Beragama di Desa Wonoasri Kediri Perspektif Nurcholis Madjid*. *20*(02).
16. Munif, A., Miranina, Z. S., & Kediri, I. (2024). *Moderasi Beragama dan Pengaruhnya Terhadap Kerukunan Umat Beragama di Kota Kediri*. *22*(01), 61–91.
17. Muthoharoh, S. N., Nasikhah, S. L., & Chaniago, M. C. (2026). *Pluralisme dalam Ajaran Islam : Telaah Konsep dan Implementasinya dalam Masyarakat*. 2088–2097.
18. Nanda, R. A. E., Budianto, A., & Budiono, H. (n.d.). *Toleransi Antar Umat Beragama di Desa Tanon , Kecamatan Papar , Kabupaten Kediri , Sebagai Wujud Bangsa yang Berbhineka*. 732–738.
19. Nendissa, J. E., Simamora, R. H., & Rotua, D. M. (2025). *Pluralisme Agama-Agama : Tantangan , Peluang , dan Perspektif Teologis Dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. *2*(2), 155–184.
20. Sabrina, N. (2024). *Pemikiran Pluralisme : Gagasan Abdurrahman Wahid dan Ahmad Hasyim Muzadi*. *1*.
21. Safira, M., Tohari, P., Firdaus, E. D., Hermansyah, E. D., & Putri, A. N. (n.d.). *PENDAHULUAN Sangat penting untuk memiliki pemahaman yang terukur tentang konsep multireligi dalam lingkungan hidup beragam agama . Apalagi terkait dengan perbedaan agama tidak boleh dijadikan dasar untuk membedakan atau bahkan membenci seseorang . Sebaliknya , perbedaan ini harus dianggap sebagai peluang untuk mengukur tingkat toleransi dan harmoni yang kita miliki . 340 Karena keberagaman merupakan bagian integral yang sangat penting dalam lukisan Indonesia . Dimana Indonesia sendiri merupakan sebuah negara yang kaya akan budaya dan memiliki keberagaman agama dalam satu konsep pancasila . 341 Tampak terlihat dari keberagaman yang ada dalam bangsa kita ini dapat kita jadikan cara bertoleransi dengan baik . Maka dari itu perlu sekali kita paham makna keberagaman dalam hidup terlebih dahulu , guna membuka sikap toleransi kita terhadap orang sekitar . Keberagaman agama adalah fenomena khas yang menggambarkan beragamnya keyakinan , praktik , dan ritus keagamaan yang dianut oleh berbagai kelompok manusia di seluruh dunia . Ini adalah salah satu aspek penting dalam masyarakat global yang sangat kompleks , yang mencerminkan kaya dan beragamnya budaya manusia . Keberagaman agama mengacu kepada beragamnya agama-agama yang dianut oleh individu dan kelompok di seluruh dunia . 342 Agama sendiri sebagai sistem keyakinan , nilai , praktik , dan ritus yang membentuk cara individu atau kelompok berinteraksi dengan yang ilahi , mengatur moral , dan memberikan makna dalam hidup . 343 Ada berbagai agama di dunia , tetapi tidak terbatas pada Islam , Kristen , Hindu , Buddha , Sikh , Yahudi , agama-agama tradisional , dan agama-agama semakin memperkaya keberagaman agama . 344 Kehidupan manusia dalam berbagai agama sangat beragam . Dalam Kristen , orang diarahkan untuk mengikuti ajaran Yesus Kristus dan mencari keselamatan melalui iman . 345 Dalam Islam , umat Muslim mengikuti ajaran Qur ' an dan Hadis , menjalani lima rukun Islam , dan mencari akhirat . Hindu mengerjakan reinkarnasi dan pencarian penceahan . Buddha menekankan penghilangan penderitaan melalui Dharma . Dalam agama Yahudi , Tuhan adalah fokus utama , dan hukum Taurat diikuti . Agama-agama ini memiliki ritual , ibadah , dan etika yang berbeda . Namun , mereka semua mendorong umatnya untuk menjalani kehidupan yang baik , jujur , dan bertanggung jawab , serta berusaha mencapai keselamatan atau pencerahan . 18*(1). https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.686
22. Santika, D. A., Triana, I., Winda, A. N., & Sari, H. P. (2026). *Peran Pendidikan Islam Dalam Menumbuhkan Sikap Toleransi Dan Moderasi Beragama Di Masyarakat Multikultural*. 87–94.

DOI: https://doi.org/ 10.31004/riggs.v5i2.10801
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

23. Sensiana, M. P., & Mukti, A. (2025). *Penanaman Toleransi Antar Umat Beragama (Studi Pendidikan Anak Usia Dini Umat Muslim dan Hindu di Kediri Jawa Timur)*. *04*(02), 32–42.
24. Wijanarka, T., Kadek, N., Anggun, D., & Sari, P. (n.d.). *Pluralisme dalam Perwujudan Toleransi melalui Relasi Komunitas Gusdurian-Gereja Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW)*. *46*(2), 169–184.

DOI: https://doi.org/ 10.31004/riggs.v5i2.10801
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)